

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025



STASIUN KIPM MAMUJU

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Nasional dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMKHP) merumuskan Visi dengan mengacu pada beberapa isu yang tertuang dalam Asta Cita antara lain yang terkait dengan:

1. Meningkatkan gizi anak melalui makanan bergizi gratis
2. Swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia
3. Hilirisasi komoditas

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Mamuju untuk mewujudkan Visi Misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dalam jangka waktu satu tahun Anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai SKIPM Mamuju pada tahun 2025.

Demikian RKT SKIPM Mamuju Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Mamuju, Januari 2025
Kepala SKIPM Mamuju,



Darwis, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Peran Organisasi	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran.....	4
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN	
2.1 Visi.....	5
2.2 Misi	6
2.3 Tujuan	7
2.4 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja.....	8
2.4.1 Sasaran Startegis.....	8
2.4.2 Indikator Kinerja.....	15
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran.....	21
2.6 Kegiatan Keuangan.....	22
2.6.1 Anggaran	22
2.6.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	23
BAB III. PENUTUP	
Penutup.....	24

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal.
1	<i>Klasifikasi tugas/jabatan Pegawai di Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025.....</i>	3
2	<i>Indikator kinerja Program Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025.....</i>	18
3	<i>Anggaran Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2018 - 2025.....</i>	22
4	<i>Daftar Realisasi Penerimaan Imbalan Jasa Karantina Ikan Pada Stasiun KIPM Mamuju 2021– 2025.....</i>	23

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal
		.
1	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju	3
2	Struktur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	21
3	Struktur Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan.....	22

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka pembangunan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Kelautan dan perikanan. Peranan Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Mamuju menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan keamanan pangan terutama produk perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam membangun kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumber daya perikanan.

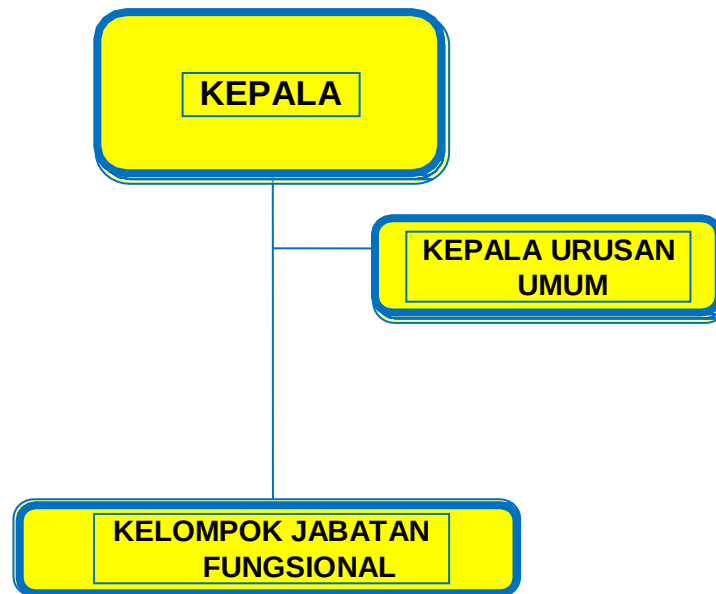
Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia, Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya membahayakan kesehatan manusia, Oleh karena itu BPPMHKP dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

yang terpercaya dalam serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan Internasional mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara . Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti : Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang , China , Rusia dan Kanada, Semakin mem perketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety Assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai instrument pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure” (Perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan – peraturan teknis (Khususnya Karantina dan keamanan pangan) Guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade) hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia penghasil Produk kelautan dan perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, terbagi atas tugas/jabatan masing-masing pegawai. Klasifikasi tugas/jabatan pegawai di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dapat dilihat pada Tabel 1 :

Klasifikasi tugas/jabatan Pegawai di Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 .

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH
1	Struktural - Kepala UPT - Kepala Urusan Umum - Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen - Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu - Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

2	Fungsional - Inspektur Mutu Ahli muda - Inspektur Mutu Ahli Pertama - Asisten Inspektur Mutu Pelaksana	2 Orang 1 Orang 1 Orang
3	Administrasi dan Keuangan	6 Orang
4	PPNPN/PJLP	9 Orang

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan SKIPM Mamuju Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKIPM Mamuju tahun 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh SKIPM Mamuju pada tahun 2025.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana kinerja Tahunan Pembangunan SKIPM Mamuju adalah Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan SKIPM Mamuju Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP Mamuju tahun 2025-2026 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) SKIPM Mamuju Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BPPMHKP Mamuju pada tahun 2025.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. VISI

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah visi Indonesia 2025-2029 yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merupakan dasar dari visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025. Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

BPPMHKP sebagai eselon I dari KKP memiliki visi sesuai dengan Visi KKP 2025 yaitu mendukung visi Presiden dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Maka Stasiun KIPM Mamuju sebagai pelaksana visi tersebut di wilayah kerjanya yaitu di Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang**

Berkelanjutan”.

2.2 MISI

Terdapat 7 (tujuh) misi dari 8 (delapan) misi Presiden yang dilaksanakan oleh KKP yaitu :

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

Misi BPPMHKP adalah menjalankan misi Kementerian kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu,

BPPMHKP menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 menjadi dasar bagi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor maritim, reformasi struktural, serta peningkatan kualitas SDM, target pembangunan nasional diharapkan dapat dicapai secara optimal. Peran KKP dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi biru menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yaitu pada peningkatan mutu produk perikanan, BPPMHKP melaksanakan 4 program yaitu:

1. Program Manajemen Mutu
2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer
3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen
4. Program Dukungan Manajemen.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di daerah, maka misi BPPMHKP dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Mamuju yang selaras tentunya dengan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Stasiun KIPM Mamuju:

1. Mewujudkan produk perikanan Sulawesi Barat yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Meningkatkan standar pengujian dan jaminan kualitas hasil perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.
4. Melaksanakan sertifikasi mutu bagi unit usaha produksi primer serta peningkatan layanan manajerial, penguatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan sarana

dan SDM.

2.3 TUJUAN

Tujuan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Stasiun KIPM Mamuju melaksanakan tujuan yang hendak dicapai BPPMHKP adalah **meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Barat serta menjamin mutu hasil perikanannya** dengan sasaran:

1. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Sulawesi Barat
2. Meningkatnya keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Barat
4. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Sulawesi Barat
5. Meningkatnya sertifikasi mutu baik produksi primer maupun pascapanen
6. Meningkatkan pengawasan mutu produk perikanan.

Strategi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan mutu produk melalui empat langkah utama. Manajemen Mutu ditingkatkan dengan standar laboratorium, sistem jaminan mutu, dan optimalisasi quality assurance guna memastikan daya saing produk perikanan di pasar global. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer diperkuat melalui sertifikasi unit usaha, validasi lembaga, serta kebijakan teknis yang memastikan standar kualitas sejak tahap awal produksi. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen menekankan sistem traceability, sarana pengujian, serta pengawasan ketat untuk menjaga keamanan dan transparansi rantai pasok.

2.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

2.4.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Adapun sasaran strategis terkait fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun KIPM Mamuju yang merupakan penjabaran dari Sasaran BPPMHKP sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, dan lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen serta Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor.

2. Sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar adalah kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Stasiun KIPM Mamuju dan kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:

- 1) Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 2 laporan dari tahun 2025 hingga tahun 2026.
- 2) Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2 unit pada tahun 2025 hingga tahun 2026.
- 3) Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 1 lokasi pada tahun 2025 menjadi 2 lokasi pada tahun 2026.
- 4) Penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*.
- 5) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah RI, 100% pada tahun 2025 hingga tahun 2026.
- 6) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2025 hingga tahun 2026.
- 7) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP.
- 8) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor.
- 9) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
- 10) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor.
- 11) Menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO.
- 12) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten.
- 13) Sasaran strata unit pelaksana teknis BPPMHKP yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025).
- 14) Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
- 15) Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:
Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan

publik.

16) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BPPMHKP, dari 88% pada tahun 2025 menjadi 90 % pada tahun 2026.

3. Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di BPPMHKP, dengan indikator kinerja:

- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) dari 93.76% pada tahun 2024 menjadi 92% pada tahun 2025.
- b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) dari 71 % pada tahun 2024 menjadi 71.5 % tahun 2025
- c. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) dari 100 % pada tahun 2024 menjadi 100 persen tahun 2025
- d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks dari 86 % pada tahun 2024 menjadi 87% pada tahun 2025.
- e. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) dari 82% pada tahun 2024 Menjadi 86% tahun 2025
- f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) dari 80% pada tahun 2024 Menjadi 85% Tahun 2025
- g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) dari 80 % pada tahun 2024 menjadi 76% pada tahun 2025.
- h. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 70 Persen tahun 2025
- i. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM

Mamuju (Nilai) 86% tahun 2025

Perencanaan Kinerja adalah integrasi antara keahlian sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan strategis organisasi. Dengan perencanaan kinerja, suatu instansi pemerintah dapat memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya secara efisien, efektif dan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan sehingga mampu bertahan dalam lingkungan sesuai kondisi saat ini. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan adanya perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dapat mengatasi perubahan secara adaptif;
2. Perencanaan strategis akan menuntun organisasi untuk menyusun strategi yang berorientasi pada hasil melalui optimalisasi kapabilitas dan sumberdaya yang dimilikinya;
3. Memungkinkan organisasi dapat memberikan komitmen pada kegiatan masa depan;
4. Organisasi dapat lebih Proaktif;
5. Organisasi dapat lebih memberikan pelayanan prima;
6. Mengetahui kelemahan-kelemahan dan hambatan organisasi sehingga dapat diperbaiki untuk tahun yang akan datang.

Sasaran strategis juga adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Mamuju yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis BPPMHKP melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya.

Derasnya arus teknologi informasi dan promosi sebagai dampak globalisasi, meningkatkan wawasan iptek, serta sikap masyarakat yang kritis menuntut transparansi dan profesionalisme karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk lebih tanggap dan cermat dalam penyelenggaraan kegiatan

pembangunan perikanan yang selama ini berfokus pada pendekatan usaha perikanan dan kelautan. Dengan demikian diperlukan penataan kembali penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan pendekatan ke sistem yang komprehensif berorientasi kepada pembangunan usaha perikanan dan kelautan.

Dalam kaitan globalisasi dan liberisasi perdagangan, petugas dituntut untuk memberikan rasa percaya kepada mitra dan pengguna jasa terhadap pelayanan jasa sertifikasi produk perikanan. Karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan suatu unit pelayanan teknis yang selalu berupaya memelihara kelestarian sumber daya alam hayati berupaya memelihara keragaman sumber daya hayati yang dimiliki negara kita. Dalam perkembangannya, kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki peningkatan fungsi dan peranan sebagai kegiatan pengendalian mutu produk perikanan agar aman dikonsumsi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan produk serta kegiatan perikanan Indonesia pada persaingan pasar yang semakin terbuka.

Keberadaan Stasiun KIPM Mamuju di Sulawesi Barat disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pengertian dan kemauan para pemakai jasa/pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan unit usaha sebagai jaminan mutu ikan/produk perikanan yang akan dipasarkan. Untuk memenuhi/ melayani keinginan para pengguna jasa maka pelayanan terus ditingkatkan tiap tahunnya berdasarkan pada Standar Pelayanan Stasiun KIPM Mamuju.

Untuk mewujudkan sistem yang tangguh, berbasiskan peraturan perundang-undangan yang kuat dalam suatu organisasi yang kompatibel untuk mencapai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka ditetapkan sasaran strategis Stasiun KIPM Mamuju, yaitu :

1. Masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang meningkat kesejahteraannya.
2. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat di Sulawesi Barat.
3. Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dan berdaya saing di Sulawesi Barat.
4. Tersedianya kebijakan yang berkualitas.
5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang handal di Sulawesi Barat.
6. Tersedianya SDM, sarana, teknologi yang berdaya saing.
7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu secara profesional dan partisipatif.
8. Aparatur Sipil Negara Stasiun KIPM Mamuju yang profesional.
9. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang andal.
10. Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
11. Pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Mamuju yang berkualitas.

2.4.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2025. Indikator Kinerja SKIPM seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja Program Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	86

		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	88

DATA ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.208.962.000
2.	Manajemen Mutu	145.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	130.069.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun 2025		3.484.031.000

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi, Adapun kegiatan dalam program pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
5. Pengembangan dan Penerapan sistem Jaminan Mutu Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai standar dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleh meningkatnya hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung jaminan mutu pangan dari hulu ke hilir.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia, Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu, pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen mutu, mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan Pengawasan dan pengendalian mutu Keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China,

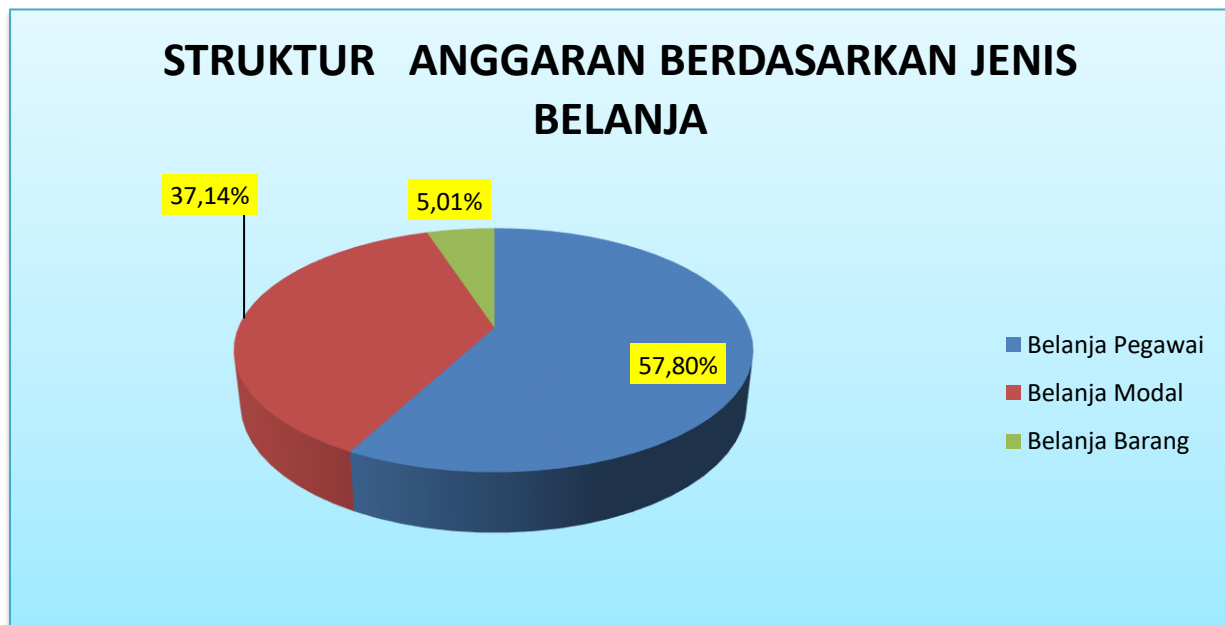
Rusia, dan negara importir lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan terselusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak / ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran BPPMHKP Mamuju

Rencana kerja dan anggaran BPPMHKP Mamuju tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pengendalian mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja BPPMHKP Mamuju dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran pengendalian Pengawasan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. **3.484.031.000,-** Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Pengawasan pengendalian mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan.

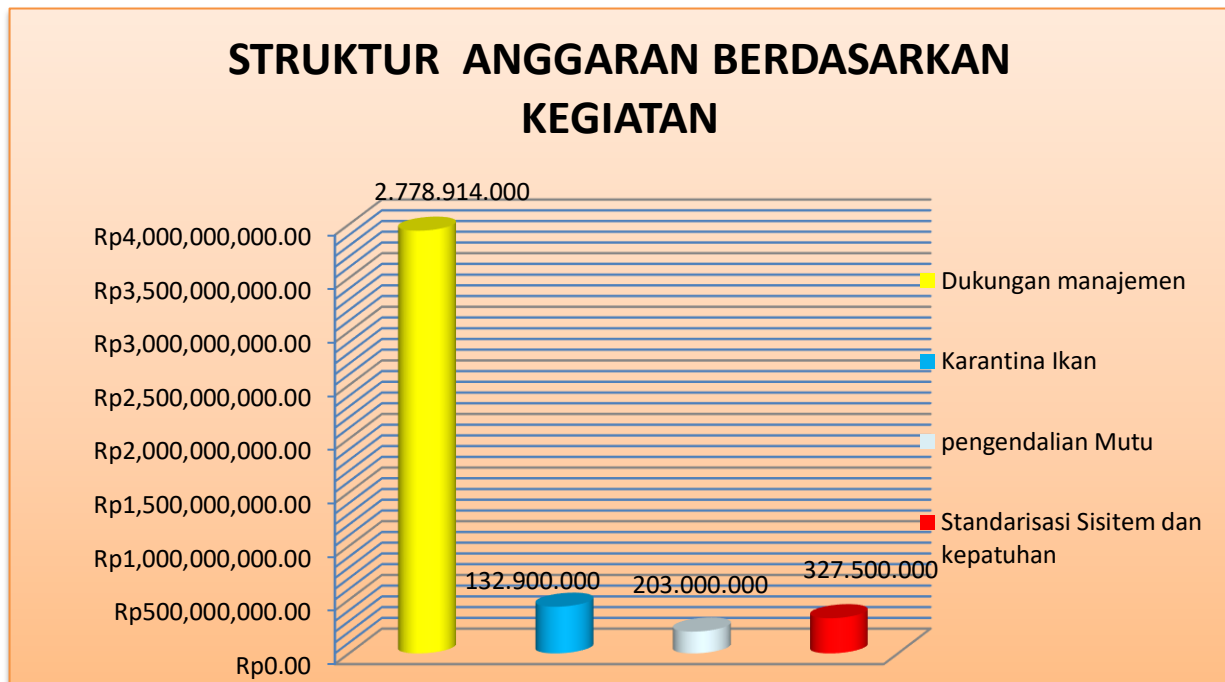
Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Mamuju untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien, dan akuntabel.

Alokasi Anggaran per kegiatan pada program pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut :



Stasiun KIPM Mamuju pada Tahun anggaran 2020 s/d 2025 melalui DIPA mendapat alokasi anggaran seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2020 - 2025



NO	T A H U N	ANGGARAN (Rp)
1	2021	4.561.640.000
2	2022	4.175.484.000
3	2023	4.905.696.000
4	2024	3.439.710.000
5	2025	3.484.031.000

Melihat tabel yang ada dari tahun 2021 s/d 2025 maka alokasi anggaran yang diterima SKIPM Mamuju hampir tiap tahun mengalami penurunan. Tetapi masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan kegiatan perkarantinaaan dan mutu ini disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat dan akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi,

globalisasi, otonomisasi daerah dan arah kebijakan pembangunan sistem dan usaha perikanan. Untuk meningkatkan tuntutan masyarakat atas pelayanan prima dari aparat pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan pelayanan yang diberikan harus dapat memberikan kepuasan publik yang dilayani.

Bentuk hambatan lain yang mempengaruhi sistem perkarantina antara lain akses pasar seperti tarif, kuota, proteksi, subsidi, inilah yang harus disikapi oleh SKIPM dalam mengalokasikan anggaran pada tiap-tiap UPT diseluruh Indonesia.

2.6.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target Penerimaan Negara Bukan pajak Tahun Anggaran 2025 pada Stasiun KIPM Mamuju sebesar Rp.141.519.000,- Seluruh penerimaan imbalan jasa Pengendalian dan pengawasan mutudari tahun sebelumnya telah disetorkan pada rekening Kas Negara.

Tabel 2. *Daftar Realisasi Penerimaan Imbalan Jasa Karantina Ikan Pada Stasiun KIPM Mamuju 2021– 2024.*

NO	Tahun	Target PNBP	Realisasi Target PNBP
1	2021	18.500.000	18.152.817
2	2022	23.000.000	7.340.000
3	2023	4.500.000	25.086.999
4	2024	3.000.000	16.783.000

BAB III. PENUTUP

Program kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA. 2025 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan, Pelaksanaan program BPPMHKP ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor, dan antar area
3. Terwujudnya pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggung jawab , dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem Jaminan mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem Jaminan mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara SKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan SKIPM Mamuju yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi SKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan SKIPM Mamuju secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran pembangunan SKIPM Mamuju pada tahun 2025 sebesar Rp 3.484.031.000,- Alokasi Anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 3.208.962.000,-
2. Program Pengendalian dan Pengawasan mutu Rp. 130.069.000,-

3. Manajemen Mutu Rp. 145.000.000,-

Demikian Rencana Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan TA. 2025 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”.